

DAFTAR ISI

	hlm	
Lembar Pengesahan	i	
Lembar Pernyataan	ii	
Abstak	iii	
Abstract	iv	
Kata Pengantar	v	
Daftar Isi.....	x	
 BAB I		
TINDAK PIDANA KORPORASI DALAM KEBAKARAN HUTAN DI PROVINSI RIAU BERDASARKAN ASAS STRICT LIABILITY DI HUBUNGKAN DENGAN UNDANG UNDANG NO 32 TAHUN 2009 TENTANG PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP		1
A. Latar Belakang	1	
B. Identifikasi Masalah	11	
C. Tujuan Penelitian	11	
D. Kegunaan Penelitian.....	12	
E. Kerangka Pemikiran.....	15	
F. Metode Penelitian.....	24	
1. Spesifikasi Penelitian	25	
2. Metode Pendekatan	25	
3. Tahap Penelitian.....	26	

4. Metode Pengumpulan Data	27
5. Alat Pengumpul Data	28
6. Analisis Data	28
7. Lokasi Penelitian	29
8. Rencana Penelitian	30
G. Sistematika Penulisan	30
 BAB II	
PERTANGGUNGJAWABAN TINDAK PIDANA KORPORASI	34
A. Pengertian Korporasi.....	34
B. Korporasi Sebagai Subjek Hukum.....	37
C. Bentuk-bentuk Pertanggungjawaban Korporasi	53
 BAB III	
ASAS <i>STRICT LIABILITY</i> TERHADAP KORPORASI DALAM	
UNDANG-UNDANG No. 32 TAHUN 2009 TENTANG	
PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP..	59
A. Perkembangan Asas <i>Strict Liability</i>	59
B. Tindak Pidana Lingkungan Hidup Berdasarkan Undang-undang No 32. Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.....	65
C. Tindak Pidana Lingkungan Hidup Berdasarkan Undang-undang No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Penerapan Asas <i>Strict</i>	

<i>Liability</i> dalam pertanggungjawaban pidana Korporasi Dibidang Lingkungan Hidup Terhadap PT. HSL, MWR, RAPP yang Diduga Terlibat Dalam Kasus Pembakaran Lahan di Provinsi Riau.....	68
---	----

BAB IV

ANALISIS YURIDIS TENTANG TINDAK PIDANA KORPORASI DALAM KEBAKARAN HUTAN DI PROVINSI RIAU BERDASARKAN ASAS <i>STRICT LIABILITY</i> DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG No. 32 TAHUN 2009 TENTANG PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	71
---	----

A. Sistem Pertanggungjawaban Terhadap Korporasi yang Melakukan Tindak Pidana.....	71
B. Penerapan Asas <i>Strict Liability</i> Terhadap Korporasi yang Melakukan Tindak Pidana Berdasarkan Undang-undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.....	79
C. Kendala yang dihadapi pemerintah dalam hal penerapan asas <i>strict liability</i> terhadap korporasi yang melakukan tindak pidana berdasarkan Undang-undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.....	82

BAB V

PENUTUP	84
A. Kesimpulan	84
B. Saran.....	86
Daftar Pustaka	xiv